

Judul : Realisasi Belanja Negara 2020 Sebesar 94,7 % : Defisit APBN Mencapai Rp 947,6 Triliun
Tanggal : Selasa, 07 September 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

Realisasi Belanja Negara 2020 Sebesar 94,7%

Defisit APBN Mencapai Rp947,6 Triliun

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan realisasi belanja negara tahun anggaran 2020 mencapai 94,7% dari rencana. Sementara itu, dari realisasi tersebut terjadi defisit anggaran Rp947,6 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kemarin. DPR menyampaikan laporan Panja Perumus Kesimpulan dalam rangka Pembicaraan Tingkat Pertama Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan laporan itu, Panja menyepakati bahwa realisasi belanja negara tahun anggaran 2020 mencapai 94,7% dari APBN 2020. Artinya, terdapat sekitar 5,3% alokasi APBN yang tidak berhasil direalisasikan. "Realisasi belanja negara dalam tahun anggaran 2020 berjumlah Rp2.595,4 triliun, yang berarti mencapai 94,7% dari APBN tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.739,1 triliun," ujar Dewi.

Panja menetapkan bahwa realisasi pendapatan negara dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun. Jumlah itu mencakup 96,9% dari APBN 2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Dewi menjelaskan, berda-

sarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan dengan belanja negara, terdapat defisit anggaran sebesar Rp947,6 triliun. Jumlah itu mencapai 91,1% dari APBN tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.039,2 triliun.

Adapun, realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp1.193,2 triliun. Jumlah tersebut mencapai 114,8% dari APBN tahun anggaran 2020. "Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp947,6 triliun dan pembiayaan sebesar Rp1.193,2 triliun, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp245,6 triliun," ujar Dewi.

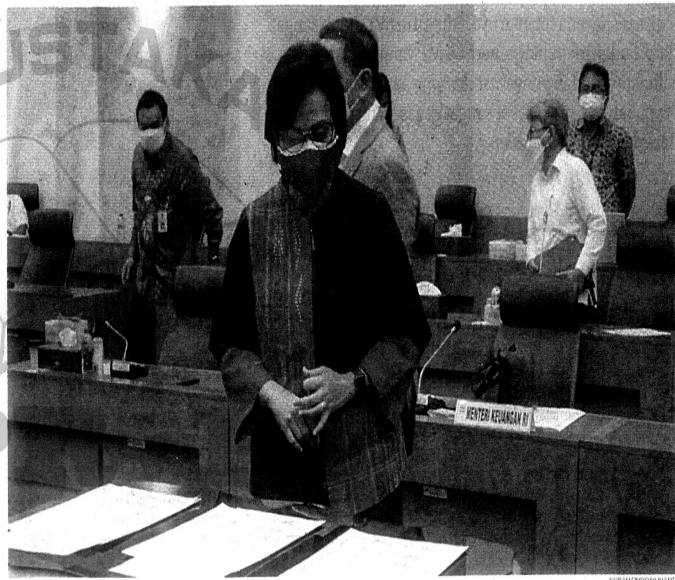
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun tersulit menjaga keuangan negara. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 terus menekan perekonomian Indonesia. "Bukan tahun yang mudah dan biasa. APBN bekerja luar biasa keras ditengah badai Covid-19," katanya saat rapat dengan Banggar DPR kemarin.

Menurut Sri, awal pandemi tahun lalu membuat pendapat-

an negara terus turun. Hal ini juga diikuti oleh belanja yang naik drastis. "Pendapatan negara mengalami penurunan drastis, di sisi lain belanja negara justru meningkat, memenuhi kewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Pemerintah juga menopang dampak perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19. Beberapa langkah harus diambil secara cepat dan tepat agar memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. "Di antaranya langsung luar biasa yang harus ditempuh menerbitkan Perpu Nomor 1/2020. Agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien," ucap Sri.

Menkeu mengapresiasi sejumlah pihak yang telah ikut membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi termasuk Badan Anggaran DPR. "Atas nama pemerintah kita berterima kasih kepada DPR atas dukungan dan pimpinan segenap badan anggaran sehingga laporan pertanggungjawaban APBN 2020 bisa terlaksana dengan lancar tanpa



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan atau RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 untuk dibawa ke rapat paripurna.

ada halangan," katanya.

Dia pun menghargai masukan, kritik maupun saran serta rekomendasi. Apalagi, DPR yang menjadi langkah perbaikan peningkatan kualitas pengelolaan negara. "Kita mendapatkan dukungan penuh dari DPR

dari berbagai langkah *extraordinary* dengan relatif baik, dengan demikian dampak pandemi Covid-19 di minimalkan," ujarnya.

Sementara itu, DPR memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Per-

tanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dibawa ke rapat paripurna.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan keseluruhan fraksi telah menyetujui

bahwa RUU P2 APBN 2020 dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. "Sembilan fraksi semua setuju. Ada catatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 catatan," katanya.

Dirina anggraeni